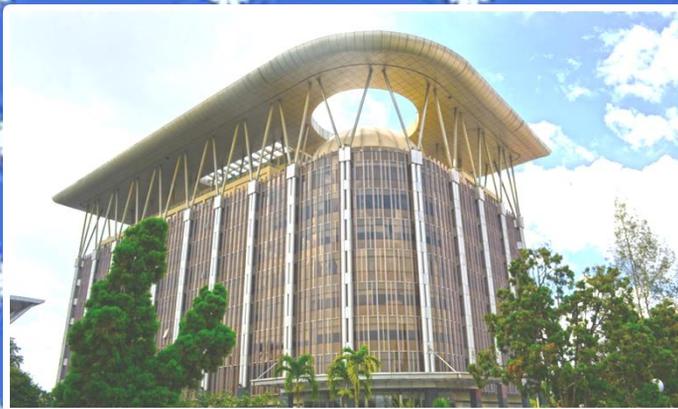




**RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
TAHUN 2022**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Akhir ini merupakan upaya perencanaan kinerja dari tahapan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang disusun melalui rangkaian mekanisme dan pembahasan, yaitu pembahasan ditingkat TAPD Provinsi yang dituangkan dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM-SKPD) Tahun 2022.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini belum secara sempurna terselesaikan seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang rencana kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2022.

Pada kesempatan ini disampaikan kepada seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini Saya ucapkan terima kasih. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah S.W.T dan dapat mewujudkan perencanaan yang baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**



Drs. H. HELMI.D, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19661231 199703 1 027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP	
PROVINSI RIAU TAHUN 2020.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan capaian Renstra SKPD	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ...	30
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Provinsi Riau	36
3.3. Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Riau	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH.....	45
BAB V PENUTUP	46



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan dokumen RKT memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja SKPD tahun sebelumnya dalam rangka pencapaian rencana strategis juga memperhatikan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya yaitu dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2022 dan dokumen Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2022.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan kinerja dari tahapan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang

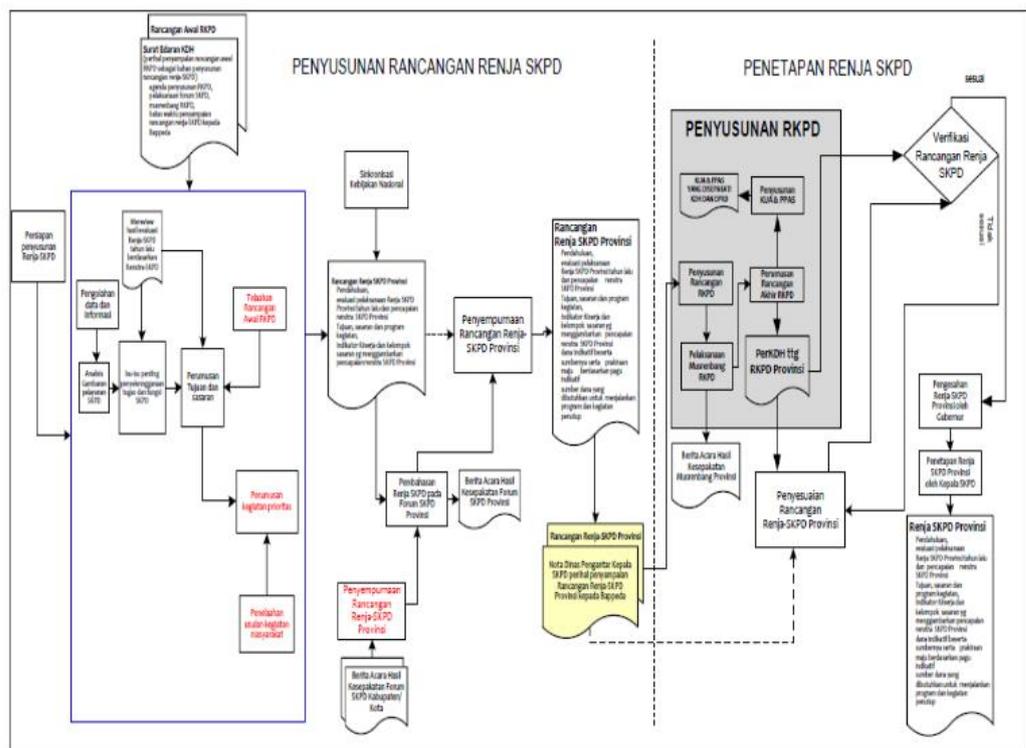


disusun melalui rangkaian mekanisme dan pembahasan, yaitu pembahasan ditingkat Provinsi pada Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM-SKPD) untuk membahas rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 hingga pembahasan-pembahasan teknis yang dilakukan antara SKPD dengan TAPD untuk penajaman program dan kegiatan yang dianggap prioritas.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja Perangkat Daerah akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah/Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat enam (6) Tahapan utama dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah yakni: persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap penyusunan rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas

Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah, sedangkan tahapan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 melalui beberapa tahapan, yaitu : Penyusunan Rancangan Awal, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah terlihat seperti gambar berikut ini:



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, melakukan inventarisir permasalahan dari hasil evaluasi renja tahun sebelumnya (evaluasi renja tahun 2021 dan memperhatikan kondisi eksisting (renja 2021) serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat, dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



Secara hierarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

1.2 DASAR HUKUM

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : (Masukkan Lembaran Negara)

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koprupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;



7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau;
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau;



23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021;
28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



32. Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan tahun 2022.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 adalah untuk:

1. Membentuk kesepakatan bersama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengenai kinerja yang ditargetkan untuk dicapai pada Tahun 2022.
2. Sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan dasar dalam pengukuran capaian kinerja Tahun 2022.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA tahun anggaran 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 dibagi dalam beberapa bab dan lampiran. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:



Bab I ***Pendahuluan***

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II ***Hasil Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020***

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Bab III ***Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan***

Memuat Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Bab IV ***Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah***

Penutup

Bab V Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2020

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/ kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2020 didasarkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019- 2024, untuk mengetahui:

1. Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
2. Impilkasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
3. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan.

- Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program



kerja. Disana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi key-success factors-nya Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMP7SP Provinsi Riau Tahun 2022.

- Merancang (desain) kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
- Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara Fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
- Pelaporan hasil evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis. Berkaitan dengan Evaluasi Renja.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020. Berkaitan dengan pelaksanaan Renstra SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi



Riau Tahun 2019-2024 dan mempertimbangkan bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020 merupakan Rencana Kerja tahun kedua dalam Renstra tahun 2019-2024, maka berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pengisian tabel tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau s/d tahun berjalan hanya mencantumkan program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra SKPD Tahun 2020. Pencapaian kinerja kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dicapai melalui program dan kegiatan yang uraian evaluasinya dapat dilihat pada Tabel 2.1. (Tabel T.C-29) tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah DPMP7SP dibawah ini:



2.1.1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

A. Pendapatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tidak memiliki anggaran pendapatan.

B. Belanja

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp. 22.426.695.940,66, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 19.643.200.120,66, dan Belanja Langsung sebesar Rp2.783.495.820, dijabarkan dalam 5 Program dan 19 Kegiatan.

Pada tahun anggaran 2020 terdapat kegiatan yang tidak memenuhi target antara lain:

1. Program Peningkatan Investasi

- a. Kegiatan Pengembangan Promosi dengan Realisasi 26,60%

Walaupun ada beberapa program / kegiatan yang kurang dari target, namun secara keseluruhan kinerja yang dicapai adalah baik. Beberapa capaian program Renstra DPMPPTSP yang tidak tercapai targetnya, berdampak atau berimplikasi pada capaian indikator kinerja utama DPMPPTSP. Dan untuk mengatasi hal tersebut, maka akan dilakukan upaya untuk penambahan terget kinerja pada tahun yang akan datang untuk mencukupi target Renstra yang telah ditetapkan.



2.1.2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Dalam struktur keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal, dan berdasarkan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau termasuk SKPD yang menjalankan Fungsi Ekonomi. Hasil kinerja program / kegiatan Rencana Kerja Tahun 2020 telah memenuhi target.

Adapun program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

1. Program Peningkatan Investasi dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan sistem informasi penanaman modal dengan target 2 aplikasi dan realisasi 2 aplikasi (76,33%).
 - b. Pengendalian penanaman modal dalam negeri (PMDN) Provinsi Riau dengan target 26 PMDN dan realisasi 9 PMDN (73,67%).
 - c. Penyusunan buku statistik investasi daerah dengan target 225 buku statistik dan realisasi 225 buku statistik (99,59%).
2. Program Penyelenggaraan Perizinan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan sistem informasi/publikasi tentang pelayanan perizinan dan nonperizinan Provinsi dengan target 3 aplikasi dan realisasi 3 aplikasi (78,67 %).
 - b. Penerapan dan pengendalian Manajemen mutu pelayanan dengan target 2 Laporan dan realisasi 2 Laporan (100%).



- c. Publikasi pelayanan Perizinan dan nonperizinan dengan target 2 jenis media informasi dan realisasi 2 jenis media informasi (97,28%).
- d. Peningkatan kinerja tim survey perizinan dan nonperizinan dengan target 220 BAP dan realisasi 220 BAP (100%).

Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang dialokasikan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2020 tidak mengalami APBD Perubahan dengan uraian serta realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	22.426.695.940,66	20.971.848.920,00	93,51
Belanja Tidak Langsung	19.643.200.120,66	18.397.875.522,00	93,66
Belanja Langsung	2.783.495.820,00	2.573.973.398,00	92,47
a. Belanja Barang dan Jasa	2.783.495.820,00	2.573.973.398,00	92,47

Sumber : Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan DPMPPTSP Provinsi Riau.

Anggaran Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.19.643.200.120,66-terrealisasi sebesar Rp. 18.397.875.522,- atau 93,51 persen.

Anggaran Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp.2.783.495.820 terealisasi sebesar Rp.2.573.973 atau 92.47 persen digunakan untuk melaksanakan 19 (Sembilan Belas) kegiatan pada 5 lima) program.

- A.** Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan APBD Provinsi Riau dan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020 melalui kegiatan-kegiatan yang uraiannya dapat dijelaskan sebagai berikut



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.998.000 dan terealisasi sebesar Rp.7.135.000,- Melalui kegiatan ini telah tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat selama 1 tahun.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.32.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.369.006. Melalui kegiatan ini telah tersedianya fasilitas kantor dan sarana komunikasi informasi berupa langganan telepon dan operasional website/internet pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

c. Penyediaan alat tulis kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 190.930.000 dan terealisasi sebesar Rp. 190.550.000,- Melalui kegiatan ini telah tersedianya alat tulis kantor sebanyak 45 jenis untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.193.840.000,- dan terealisasi sebesar Rp.193.300.000. Melalui kegiatan ini telah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.744.000,- dan terealisasi sebesar Rp.75.694.000,-



Melalui kegiatan ini telah tersedianya makan dan minum keperluan kantor sebanyak 6843 porsi serta untuk keperluan rapat, tamu dan kegiatan lainnya selama 1 tahun.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.327.098.120,- dan terealisasi sebesar Rp.326.992.570,-. Melalui kegiatan ini menunjang keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun.

g. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 628.080.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 565.418.000,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya Jasa Administrasi Kantor selama 1 tahun.

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.200.000,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini adalah sebagai berikut:

a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / operasional

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.225.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.224.035.492,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 1 tahun.

b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.99.991.308,- Melalui kegiatan ini tersedianya peralatan gedung kantor yang dipelihara selama 1 Tahun.

3. Program Penyelenggaraan Perizinan

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Penyelenggaraan Perizinan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.208.488.000,- dan terealisasi sebesar Rp 164.013.600,-. Melalui kegiatan ini tersedianya informasi/ publikasi tentang pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020.

b. Penerapan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.25.864.000,- dan terealisasi sebesar Rp.25.864.000,-. Melalui kegiatan ini terukurnya mutu pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020.

c. Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.93.288.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.250.000,-. Melalui kegiatan ini tersebarluasnya informasi tentang Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020.

d. Peningkatam Kinerja Tim Survey Perizinan dan Nonperizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.440.348.200,- dan terealisasi sebesar Rp.



440.345.200,-. Melalui kegiatan ini tersedianya informasi tentang BAP di Kota/Kab pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020.

4. Program Peningkatan Investasi

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Iklim Investasi adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.73.920.000,- dan terealisasi sebesar Rp.56.420.000,- Melalui kegiatan ini tersedianya peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020.

b. Pengendalian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Riau

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 29.570.000 dan terealisasi sebesar Rp.21.785.000,- Melalui kegiatan ini Termonitornya Pengendalian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Riau yang Telah di keluarkan pada tahun 2020

c. Penyusunan Buku Statistik Investasi Daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 24.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.797.800,- Melalui kegiatan ini terlaksannya Penyusunan buku statistiK investasi daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020.

d. Pengembangan Promosi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 89.527.500,- terealisasi sebesar Rp. 23.812.422,- Melalui kegiatan ini terlaksannya Pengembangan Promosi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020.



2.1.3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2020 tidak terdapat program/ kegiatan yang melebihi target kinerja/ hasil keluaran yang direncanakan. Capaian IKU melebihi target antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat target 91 dan realisasi 99 (109,26 %) realisasi Investasi dengan target 40 T dan realisasi 34 T (118,75%).

Pengukuran Kinerja DPMPPTSP Provinsi Riau Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi Investasi PMA / PMDN	PMA/PMDN (Milyar RP) 40.810.00	PMA(Jutaan / US \$) 1.077,98 PMDN (Milyar/ Rp) 34.117,81	118,75
2	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPMPPTSP Provinsi Riau	Nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat = 91	Nilai Interval konversi indeks kepuasan masyarakat sampai dengan Desember 2020= 99	109,26

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kegiatan Pengembangan Promosi Tahun 2020 dengan anggaran Rp. 89.527.500 untuk 1 (satu) kali pelaksanaan dengan realisasi keuangan Rp. 23.812.422 atau 26,60% dari alokasi anggaran. Pada kegiatan Pengembangan Promosi ini tidak dapat dilaksanakan karena pandemic Covid 19.



2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Provinsi Riau pada umumnya,
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Provinsi Riau.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja DPMPTSP Provinsi Riau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSP Provinsi Riau, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Penanaman Modal yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau



ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan DPMPTSP Provinsi Riau, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPMPTSP Provinsi Riau kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) DPMPTSP Provinsi Riau, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024. Dalam analisis Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, telah dijabarkan indikator Penetapan Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020 .

2.2.1 Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja DPMPTSP Provinsi Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam dalam Perubahan RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2019– 2024 dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

2.2.2. Lampiran Tabel T-C.30



2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan komitmen Kepala Negara dalam rangka mencegah korupsi dan menyajikan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan murah.

Permasalahan dan hambatan DPMPPTSP Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum optimalnya sinergitas, integrasi, dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- c. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service;
- d. Terhambatnya investasi karena tersedianya lahan untuk industri yang terkendala oleh Tata Ruang dan keterbatasan infrastruktur pendukung;
- e. Belum optimalnya pencatatan investasi berbasis LKPM;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan media promosi untuk menarik minat investasi;
- g. Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan kabupaten/kota.

Terkait dengan program tersebut terdapat dua Kementerian dan satu Lembaga Tinggi Negara yang terlibat secara langsung dalam tata kelola pelayanan yang disajikan oleh PTSP, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementrian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, yaitu :



1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Visi Kementerian Dalam Negeri:

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berada pada Direktorat Pembangunan Daerah dengan Visi:

Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan daerah secara berkelanjutan”

Dengan strategi pencapaian program dalam koridor kebijakan strategik yaitu Mendorong Penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi. Bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dibutuhkan pelayanan publik yang dapat mendorong peningkatan investasi dalam rangka mendorong angka pertumbuhan ekonomi di daerah.

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Visi yang dirumuskan adalah:

“Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani”

Agar pencapaian dapat dilakukan secara maksimal maka ditetapkan sasaran strategis yang terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya dan yang menjadi indikator



utamanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata nasional 91.

Peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui rencana aksi:

- a. Peningkatan Pelayanan Perizinan :
 - a.1. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan
 - a.2. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan
 - Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Pembatasan Waktu Pengurusan Izin
- b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui :
 - Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan perwakilan Komisi Ombudsman di daerah-daerah);
 - Peningkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda;
 - Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
 - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

3. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia

Memiliki visi:

“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.””

Pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang kondusif menjadi salah satu prioritas dari sebelah prioritas nasional dibidang penanaman modal.

Dalam rencana strategis telah dituangkan bahwa iklim penanaman modal yang kondusif termasuk dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan didaerah dan



telah dilimpahkan kepada daerah kewenangan perizinan penanaman modal melalui implementasi sistem PTSP di daerah dan diimbangi peningkatan sistem pelayanan di kantor BKPM. Hal ini menjadi prioritas dalam rangka koordinasi pelayanan penanaman modal ditingkat Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kab/Kota.

Suatu perkembangan yang positif bagi BKPM adalah dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan Pepres ini, BKPM menyelenggarakan sistem PTSP di pusat dan untuk itu BKPM menerima pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dari Instansi terkait dan Pemerintah Daerah terkait penanaman modal yang menjadi urusan Pusat.

Disamping itu juga BKPM berwenang menetapkan standar, norma. Standar dan prosedur serta kelayakan operasi sistem PTSP yang dijalankan Pemerintah Daerah melalui implementasi sistem SPEPISSE yakni sistem online pelayanan perizinan penanaman modal.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPPTSP Provinsi Riau. Dalam rangka meningkatkan pelayanan DPMPPTSP Provinsi Riau mempunyai tantangan sebagai berikut :

- a. Semakin meningkatnya peran nilai investasi dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau;
- b. Semakin tingginya harapan peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan pembangunan nasional;
- c. Semakin banyaknya perizinan yang menjadi kewenangan provinsi akibat berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Semakin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik;



- e. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap penanaman modal;
- b. Iklim usaha yang kondusif di Provinsi Riau memberikan peluang pada masuknya investasi;
- c. Posisi geografis yang strategis dan terbangunnya infrastruktur transportasi nasional yang semakin baik;
- d. Dukungan komitmen peningkatan pelayanan dari pimpinan daerah dan dukungan pemerintah pusat;
- e. Struktur kelembagaan yang lebih kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan perizinan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Rancangan awal RKPD Provinsi Riau tahun 2020 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan



pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Penanaman dan PTSP pada urusan pelayanan.

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.3. (Tabel T-C.31)



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau didalam penyusunan Rencana Program dan kegiatan tahun 2022 tidak terdapat usulan aspirasi pemangku kepentingan dan kegiatan masyarakat. seperti unsur akademisi/ perguruan tinggi, LSM dan Perangkat Daerah di Provinsi, seperti terdapat pada tabel T.C.32 berikut :

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2019-2024. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

VISI Pembangunan Nasional untuk tahun 2019-2024 adalah:

" Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)"

Visi Riau untuk pembangunan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2024 memiliki makna berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul dengan penjelasan sebagai berikut:

Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none">– Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)– Meningkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar– Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan kemandirian daerah
----------------------	--

Usulan :

Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal.



Sejahtera

- Mengurangi ketimpangan sosial
- Menanggulangi kemiskinan
- Menurunkan tingkat pengangguran

Usulan :

Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.

Bermartabat

- Meningkatkan kehidupan beragama
- Melestarikan adat istiadat
- Mengembangkan nilai sosial dan budaya

Usulan :

Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.

Unggul

- Prestasi di bidang seni, budaya dan agama
- Prestasi di bidang olahraga
- Terbaik dan terdepan dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan
- Terobosan dan inovasi daerah

Usulan :

Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan



Visi ini diwujudkan melalui 5 (lima) MISI PEMBANGUNAN, yaitu:

- Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.
Usulan :
Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing
- Misi 2: Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Misi 3: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
- Misi 4: Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
- Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara.
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.



7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK

1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global.
2. Memperkuat sistem pertahanan negara.
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi.
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda.
8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.
9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan.
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.
12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI

1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM.
2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.
4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untuk masyarakat lokal/sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan.



5. Membangun pemberdayaan buruh.
6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional.
7. Penguatan investasi domestik.
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.
9. Membangun infrastruktur.
10. Membangun ekonomi maritim.
11. Penguatan sektor kehutanan.
12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan.
14. Membangun karakter dan potensi wisata.
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.
16. Pengembangan industri manufaktur.

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN

1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial.
3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga.

Pokok – pokok Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pendapatan negara, antara lain melalui:
 - a. Perluasan basis perpajakan antara lain e-commerce, cukai plastik, optimalisasi PPN
 - b. Penguatan sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian
 - c. Pemberian insentif fiskal secara terukur dan berkeadilan
 - d. Optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif antara lain dengan penerapan Highest and Best Use (HBU)
 - e. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan BLU



2. Mendorong penguatan belanja yang berkualitas antara lain melalui:
 - a. Fokus untuk mendukung reformasi struktural penguatan daya salang dan kapasitas produksi (penguatan SDM, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi serta reformasi institusional
 - b. Penyesuaian cara kerja baru dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas
 - c. Penyelesaian prioritas nasional secara terstruktur dan efektif
 - d. Pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan, tertinggal terluar dan terdepan (3T) serta permukiman kumuh perkotaan
 - e. Reformasi sistem penganggaran dengan penguatan spending better, subsidi tepat sasaran dan penguatan desentralisasi fiskal.

3. Mengoptimalkan pembiayaan anggaran, antara lain melalui:
 - a. Fleksibilitas pembiayaan utang sebagai instrumen countercyclical namun tetap menjaga rasio utang dalam batas aman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
 - b. Mendorong pembiayaan inovatif (antara lain penguatan peran BUMN, Badan Layanan Umum/BLU, Sovereign Wealth Fund/SWF, dan Special Mission Vehicle/SMV) (dalam rangka penyelesaian Proyek Strategis Nasional
 - c. Meningkatkan akses pembiayaan bagi Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKMI, Usaha Mikro (UMI) dan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMP TSP Provinsi Riau Tahun 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Instansi Pemerintah merupakan target indikator kinerja tingkat sasaran sratejik untuk masing-masing unit kerja. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan dinyatakan dalam angka capaian realisasi atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi indikator kinerja sasaran untuk masing-masing unit kerja/instansi. Pencapaian angka-angka indikator kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan hasil pencapaian sasaran strategis.

Berdasarkan rumusan yang tertuang dalam Renstra, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2022 berdasarkan bidang kewenangan yang dimilikinya. Setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini dirumuskan dari dokumen perencanaan strategis. Sasaran strategis ini sebagaimana tertuang dalam Kerangka Umum



Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2022.

Adapun sasaran rencana kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan rumusan Rencana Strategis adalah :

1. Meningkatnya realisasi PMA/PMDN dengan indikator capaian adalah:
 - a. Nilai realisasi investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan.
 - b. Angka Indeks Kepuasan Masyarakat, IKM = 99,48
2. Meningkatnya penerapan standar pelayanan dengan indikator capaian adalah:
 - a. Peningkatan Pertumbuhan IKM
 - b. Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM
3. Meningkatnya budaya pelayanan prima
 - a. Peningkatan Pertumbuhan IKM
 - b. Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM

Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2022 tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Subkegiatan. Program dan kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Riau Tahun 2022, dan merupakan bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk mengimplementasikan rencana strategis.

Uraian target sasaran program dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana tercantum pada formulir RKT pada lampiran tabel Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 terlampir.



3.3. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berisikan tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program dan kegiatan dan pagu indikatif.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2022 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ini adalah sebagai berikut :

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.18.093.081.817,-. Melalui kegiatan ini telah terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.87.600.000,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi pegawai DPMPPTSP Provinsi Riau yang disediakan dan jumlah sebanyak 146 Stell.



Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.350.005759,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya jenis alat tulis kantor yang disediakan dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun sebanyak 43 Jenis dan 195 Unit.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 200.000.000,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya makan dan minum keperluan kantor dengan persentasi 100% serta untuk keperluan rapat, tamu dan kegiatan lainnya selama 1 tahun.

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.99.659.807,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 40 jenis untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 615.639.000,-. Melalui kegiatan ini menunjang keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

g. Penyediaan jasa surat menyurat

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.000.000,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya



pelayanan administrasi surat menyurat sebanyak 200 surat selama 1 tahun.

h. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.44.279.800,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya fasilitas kantor dan sarana komunikasi informasi berupa langganan telepon dan operasional website/internet pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.255.031.280,-. Melalui kegiatan ini terciptanya jasa pelayanan umum kantor yang baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama 1 tahun.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 44.030.000,-. Melalui kegiatan ini Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 222.030.000,-. Melalui kegiatan ini terpeliharanya



kendaraan dinas / operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

1. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Melalui kegiatan ini telah terpeliharanya peralatan gedung kantor melalui rehap ataupun pemeliharaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

2. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Sub Kegiatan:

a. **Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.143.205.000,-. Melalui kegiatan ini tersedianya jumlah peta potensi investasi Provinsi Riau sebanyak 1 Buku.

3. **Program Promosi Penanaman Modal**

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

a. **Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi**



Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.381.737.390,-. Melalui kegiatan ini terpenuhinya event promosi PMA/PMDN.

b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.449.968.398,-. Melalui kegiatan ini terpenuhinya event promosi PMA/PMDN.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Realisasi kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.17.496.000,-. Melalui kegiatan ini meningkatnya jumlah penanaman modal lintas daerah Kab/Kota.

Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.549.029.080,-. Melalui kegiatan ini terpenuhinya 250 BAP dan Penyuluhan 12 Kabupaten Kota di Provinsi Riau.



c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.195.399.949,-. Melalui kegiatan ini terwujudnya pelaksanaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan oleh masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.79.650.000,-. Melalui kegiatan ini terpenuhinya pengendalian penanaman modal PMA/PMDN sebanyak 34 PMDN.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.643.994.000,-. Melalui kegiatan ini terlaksananya kegiatan pembinaan penanaman modal sebanyak 324 Orang.

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.185.850.000,-. Melalui kegiatan ini terpenuhinya pengendalian penanaman modal PMA/PMDN sebanyak 33 PMDN.



6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Subkegiatan:

a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.133.892.000,-. Melalui Kegiatan ini urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal terpenuhinya 3 Buku.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) program ,11 (Sebelas) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 23.861.579.280 (Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp.21.081.357.463,-
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp. 143.205.000,-
3. Program Promosi Penanaman Modal Rp. 831.705.188,-
4. Program Pelayanan Penanaman Modal Rp. 761.925.029,-
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Rp. 909.494.000,-
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Rp. 133.892.000,-



BAB V

PENUTUP

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Provinsi Riau Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA Provinsi Riau Tahun 2022, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.



3. Rencana Kerja Provinsi Riau Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Rencana Kerja (RENJA)SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan Renstra Dinas).

Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:



1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.



9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022. Melalui dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 ini, diharapkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2022.

Pekanbaru, September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**



Drs. H. HELMI.D, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199703 1 027

Tabel 0.1 (T.C.07)
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Lampiran : RENSTRA DPMPTSP Provinsi
 Riau
 Tahun 2019 - 2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target										Unit Kerja SKPD Pengguna Anggaran	Lokasi		
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				BELANJA LANGSUNG				6,999,672,025.00		7,886,760,020.47		7,894,799,798.41		8,475,187,256.62		9,079,222,748.56		89,856,601,546.06		
				A. URUSAN SKPD																
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu		100	2,664,884,825.00	100	2,662,202,825.51	100	2,805,802,871.48	100	3,027,718,184.84	100	3,208,837,517.48	100	14,866,885,423.86	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
				12 01 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	200 surat	15,000,000.00	200 surat	15,000,000.00	200 surat	20,000,000.00	200 surat	20,000,000.00	200 surat	20,000,000.00	300 surat	90,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
				12 01 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	12 Rekening	18,600,000.00	12 rekening	45,000,000.00	12 rekening	50,000,000.00	12 rekening	60,000,000.00	12 rekening	75,000,000.00	12 rekening	248,600,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
				12 01 01 003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan peralatan kantor yang disediakan	80 Unit	399,000,000.00	80 unit	450,000,000.00	82 unit	500,000,000.00	82 unit	500,000,000.00	84 unit	550,000,000.00	84 unit	2,399,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
				12 01 01 007	Penyediaan Alat tulis Kantor	jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	50 Jenis	348,000,000.00	55 jenis	350,000,000.00	60 jenis	375,000,000.00	63 jenis	400,000,000.00	65 jenis	400,000,000.00	65 jenis	1,873,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
				12 01 01 008	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis barang dan laporan yang dicetak dan digandakan	57 Jenis	250,000,000.00	57 jenis	250,000,000.00	57 jenis	250,000,000.00	57 jenis	300,000,000.00	57 jenis	300,000,000.00	57 jenis	1,350,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
				12 01 01 010	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	17500 Porsi	250,000,000.00	17.500 porsi	225,000,000.00	18.000 porsi	225,000,000.00	18.200 porsi	250,000,000.00	18.300 porsi	300,000,000.00	18.300 porsi	1,250,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
				12 01 01 011	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 Orang	756,154,825.00	120 orang	642,202,525.51	125 orang	675,602,371.46	130 orang	725,000,000.00	135 orang	781,537,517.45	115 orang	3,580,497,239.96	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
				12 01 01 012	Penyediaan jasa administrasi kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang disediakan	35 OB	628,080,000.00	35 orang	635,000,000.00	35 orang	650,000,000.00	37 orang	707,718,184.00	40 orang	710,000,000.00	40 orang	3,330,798,184.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
				12 01 01 034	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kemitraan SKPD	Ketang Waktu Yang P disediakan Untuk Penyampaian Informasi dan Publikasi OPD Provinsi Riau	12 Bulan	-	12 bulan	50,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	65,000,000.00	12 bulan	70,000,000.00	12 bulan	245,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
				02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	825,000,000.00	100	281,872,784.74	100	842,888,888.70	100	881,648,888.94	100	889,085,085.28	100	1,700,288,028.84	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
				12 01 02 005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diadakan	0 Unit	-	-	-	1 unit kendaraan roda dua	37,000,000.00	1 unit kendaraan roda dua	100,000,000.00	-	-	2 unit kendaraan roda dua	137,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
				12 01 02 014	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	13 Unit	225,000,000.00	14 unit	200,002,784.74	14 unit	221,559,593.70	15 unit	176,648,556.94	15 unit	269,055,093.26	15 unit	1,092,266,028.64	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
				12 01 02 016	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	100,000,000.00	6 unit	81,970,000.00	7 unit	84,000,000.00	7 unit	75,000,000.00	8 unit	130,000,000.00	8 unit	470,970,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
				08	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur pada Dinas DPMPTSP Provinsi Riau	100	-	100	211,000,000.00	100	224,000,000.00	100	242,000,000.00	100	272,800,000.00	100	848,500,000.00		
				12 01 03 001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0 stell	-	160 Stell	115,000,000.00	165 stell	125,000,000.00	170 stell	140,000,000.00	175 stell	150,000,000.00	175 stell	530,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
				12 01 04 003	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0 stell	-	160 Stell	96,000,000.00	165 Stell	99,000,000.00	170 stell	102,000,000.00	175 stell	122,500,000.00	175 stell	419,500,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target										Unit Kerja SBD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				B. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL																
				Program Peningkatan Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi FMA/PMDN	22.89 T	24.4 T	2,154,400,000.00	24.8 T	2,275,540,207.49	25.2 T	2,429,895,549.74	25.6 T	2,609,466,069.95	26.10 T	2,794,486,285.90	26.10 T	12,261,787,912.68		
			12 01 15 001	Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi	3 Aplikasi	3 aplikasi	83,028,000.00	3 aplikasi	85,000,000.00	3 aplikasi	75,000,000.00	3 aplikasi	84,470,000.00	3 aplikasi	85,000,000.00	3 aplikasi	412,498,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 15 002	Bimbingan dan Penyaluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta	175 Orang	175 orang	59,698,000.00	200 orang	75,000,000.00	230 orang	80,000,000.00	250 orang	85,000,000.00	275 orang	87,000,000.00	275 orang	386,698,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 15 003	Promosi Luar Negeri	Jumlah lokasi event	0 lokasi	0 lokasi	-	2 lokasi	78,540,000.00	2 lokasi	80,000,000.00	4 lokasi	85,000,000.00	4 lokasi	120,000,000.00	4 lokasi	363,540,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 15 004	Promosi Dalam Negeri	Jumlah event	0 lokasi	2 event	192,044,000.00	3 event	150,000,000.00	4 event	200,000,000.00	4 event	225,000,000.00	5 event	250,000,000.00	5 event	1,017,844,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 15 005	Riau Expo	Jumlah pengunjung	80000 Pengunjung	80 000 pengunjung	275,648,000.00	85 000 pengunjung	150,000,000.00	90 000 pengunjung	145,000,000.00	95.000 pengunjung	160,000,000.00	100. 000 pengunjung	172,460,000.00	100. 000 pengunjung	903,108,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 15 006	Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Orang	80 Orang	80 orang	105,970,000.00	100 orang	75,000,000.00	120 orang	80,000,000.00	150 orang	85,000,000.00	175 orang	87,000,000.00	175 orang	432,970,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 15 007	Pelaksanaan Warta Promosi Daerah	Frekuensi Terbit dan Jumlah Eksemplar yang diterbitkan	0 Edisi	0 Edisi	-	2 edisi	75,000,000.00	2 edisi	80,000,000.00	2 edisi	85,000,000.00	2 edisi	87,000,000.00	2 edisi	327,000,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 15 008	Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal	Jumlah sarana dan prasarana promosi	2 Unit	2 unit	100,000,000.00	7 unit	100,000,000.00	7 unit	125,000,000.00	8 unit	150,000,000.00	8 unit	160,000,000.00	8 unit	635,000,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 15 009	Sinkronisasi dan pemutakhiran data investasi FMA/PMDN	Jumlah dokumen proyek investasi FMDN / FMA	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 dokumen	60,000,000.00	1 dokumen	69,900,000.00	1 dokumen	70,000,000.00	1 dokumen	80,000,000.00	1 dokumen	279,900,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 15 010	Pelaksanaan kemitraan UMKM dengan Perusahaan FMA/PMDN	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan kemitraan UMKM dengan Perusahaan FMA/PMDN	75 peserta	75 peserta	185,032,000.00	80 peserta	100,000,000.00	80 peserta	125,000,000.00	80 peserta	135,000,000.00	80 peserta	145,000,000.00	315 peserta	690,032,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 15 011	Pengendalian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Riau	Jumlah perusahaan FMA dan PMDN yang dikendalikan	38 PMDN	38 PMDN	150,000,000.00	38 PMDN	135,000,000.00	38 PMDN	150,000,000.00	38 PMDN	200,000,000.00	38 PMDN	210,000,000.00	38 PMDN	845,000,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 15 012	Penghargaan RIAU INVESTMENT AWARD	Jumlah kategori penghargaan yang diberikan	12 Kab/kota	12 Kab/Kota	455,300,000.00	12 Kab/Kota	350,000,000.00	12 Kab/Kota	400,000,000.00	12 Kab/Kota	450,000,000.00	12 Kab/Kota	460,000,000.00	12 Kab/Kota	2,115,300,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			014	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Riau	Jumlah peta potensi investasi Provinsi Riau	4 Peta	4 Peta	299,352,000.00	4 Peta	200,000,207.49	2 Peta	209,995,549.74	0	-	0	-	10 Peta	709,347,537.23	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			017	Pengembangan Promosi	Jumlah proposal promosi investasi	2 Preposal	2 preposal	198,328,000.00	2 preposal	100,000,000.00	2 preposal	125,000,000.00	2 preposal	175,000,000.00	2 preposal	180,000,000.00	10 proposal	778,328,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 15 018	Penyusunan Revisi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Jumlah Dokumen Revisi RUPM	0 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	150,000,000.00	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	150,000,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 15 019	Penyusunan Buku Statistik Investasi Daerah	Jumlah Buku Statistik Investasi Daerah	225 Buku	225 buku	50,000,000.00	225 buku	50,000,000.00	225 buku	60,000,000.00	250 buku	70,000,000.00	250 buku	85,000,000.00	250 buku	315,000,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 15 020	Penyusunan Data Kemitraan antara UMKM dengan FMA / PMDN	Jumlah Laporan UMKM yang Berpotensi untuk Dimutakhirkan dengan FMA/PMDN	0 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	85,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	110,000,000.00	1 Laporan	395,000,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 15 021	Penyusunan Dokumen Investment Project Ready to Over (IPRO)	Jumlah Dokumen IPRO	0 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	150,000,000.00	2 Dokumen	200,000,000.00	2 Dokumen	249,996,069.55	2 Dokumen	250,996,285.90	2 Dokumen	850,992,355.45	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 15 023	Forum Komunikasi Peningkatan Iklim Investasi	Jumlah Laporan Iklim Investasi	0 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	125,000,000.00	1 Laporan	125,000,000.00	1 Laporan	200,000,000.00	1 Laporan	225,000,000.00	4 Laporan	675,000,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 16	Program Penyelenggaraan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	91	1,855,487,200.00	92	1,968,044,802.75	95	2,092,702,480.51	94	2,247,854,445.59	95	2,406,678,881.95	95	10,860,212,480.78		
			12 01 16 001	Forum Teknis Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan	Jumlah Laporan koordinasi teknis-teknis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan	0 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	150,000,000.00	1 Laporan	125,002,480.51	1 Laporan	145,004,448.59	1 Laporan	150,003,851.95	4 Laporan	570,010,778.05	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 16 003	Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi	Jumlah aplikasi/sistem informasi manajemen pelayanan dan perizinan dan non perizinan	3 Aplikasi	3 aplikasi	388,256,000.00									3 aplikasi	388,256,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 16 004	Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan	Jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat dan Sertifikasi ISO 9001-2015	2 Laporan	2 laporan	187,239,000.00	2 laporan	150,000,000.00	2 laporan	180,000,000.00	2 laporan	185,000,000.00	2 laporan	188,000,000.00	2 laporan	890,239,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 16 005	Publikasi pelayanan dan perizinan dan non perizinan	Jumlah media informasi tentang perizinan dan nonperizinan melalui media cetak dan media elektronik	2 Jenis	2 jenis	178,660,000.00	2 jenis	150,000,000.00	2 jenis	180,000,000.00	2 jenis	185,000,000.00	2 jenis	185,000,000.00	2 jenis	878,660,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 16 006	Konsolidasi Penanganan Pengaduan Aparatur/Masyarakat	Jumlah peserta	100 Orang	100 orang	120,000,000.00	100 orang	75,000,000.00	150 orang	80,000,000.00	155 orang	85,000,000.00	175 orang	85,000,000.00	175 orang	445,000,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 16 007	Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan Yang telah diterbitkan	1 Laporan	1 laporan	58,834,000.00	1 laporan	50,000,000.00	1 laporan	50,000,000.00	1 laporan	65,000,000.00	1 laporan	68,000,000.00	1 laporan	291,834,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12 01 16 008	Peningkatan Kinerja Tim Survey Perizinan dan NonPerizinan	Jumlah BAP	120 BAP	120 BAP	584,920,000.00	225 BAP	500,000,000.00	250 BAP	550,000,000.00	275 BAP	550,000,000.00	300 BAP	585,000,000.00	300 BAP	2,769,920,000.00	DFMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target										Unit Kerja SPD Pemasngan gjawab	Lokasi		
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp			Target	Rp								
			12.01.16.009	Peningkatan Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha Provinsi Riau	Jumlah penanganan permasalahan investasi	0 Kasus	0 Kasus	-	2 Kasus	100,000,000.00	2 Kasus	100,000,000.00	2 Kasus	120,000,000.00	2 Kasus	150,000,000.00	8 Kasus	470,000,000.00	DPMPITSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12.01.16.010	Penyulahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah peserta	100 Orang	100 orang	169,898,000.00	150 orang	170,000,000.00	150 orang	180,000,000.00	150 orang	200,000,000.00	150 orang	250,000,000.00	150 orang	969,898,000.00	DPMPITSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12.01.16.011	Rapat Koordinasi PTSP	Tersedianya wadah koordinasi DPMPITSP Se Provinsi Riau dan rapat teknis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan	2 Laporan	2 laporan	167,630,200.00	2 laporan	120,000,000.00	2 laporan	120,000,000.00	2 laporan	150,000,000.00	2 laporan	175,000,000.00	2 laporan	732,630,200.00	DPMPITSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12.01.16.012	Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi	Jumlah aplikasi /sistem informasi manajemen pelayanan dan perizinan dan non perizinan	0 Sistem Informasi	0 Sistem Informasi	-	3 sistem informasi	343,044,502.73	3 sistem informasi	352,700,000.00	3 sistem informasi	367,350,000.00	3 sistem informasi	370,670,000.00	3 sistem informasi	1,433,764,502.73	DPMPITSP Prov. Riau	Pekanbaru
			013	Penyusunan Inovasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Inovasi yang mendapatkan pengakuan Nasional	0 Inovasi	0 Inovasi	-	1 inovasi	50,000,000.00	1 inovasi	75,000,000.00	1 inovasi	75,000,000.00	1 inovasi	75,000,000.00	1 Tahun	275,000,000.00	DPMPITSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12.01.15	Penyusunan Dokumen Ketatalaksanaan PTSP	Jumlah dokumen ketatalaksanaan PTSP	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	120,000,000.00	Dokumen	125,000,000.00	4 Dokumen	445,000,000.00	DPMPITSP Prov. Riau	Pekanbaru

Tabel T-C.29
 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
 PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
 PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2020

Kode	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2019 - 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2019 s/d 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
PROGRAM PELAYANAN																				
0.	0.	00.	01.	001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	1100 Surat	90,000,000	0	200	10,998,000	200	7,135,000	100.00	64.88	200	7,135,000	18.18	7.93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
0.	0.	00.	01.	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	60 Rekening	248,600,000	0	12	47,886,000	12	32,369,006	100.00	67.60	12	32,369,006	20.00	13.02	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
0.	0.	00.	01.	003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	408 Unit	2,399,000,000	0	3	13,500,000	58	10,200,000	1,933.33	75.56	58	10,200,000	14.22	0.43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
0.	0.	00.	01.	007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	293 Jenis	1,873,000,000	0	45	190,930,000	57	190,550,000	126.67	99.80	57	190,550,000	19.45	10.17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
0.	0.	00.	01.	008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	285 Jenis	1,350,000,000	0	37	193,840,000	43	193,300,000	116.22	99.72	43	193,300,000	15.09	14.32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
0.	0.	00.	01.	010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	89550 Porsi	1,250,000,000	0	6843	75,744,000	1500	75,694,000	21.92	99.93	1500	75,694,000	1.68	6.06	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
0.	0.	00.	01.	011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	610 Kali	3,580,497,240	0	103	327,098,120	100	326,992,570	97.09	99.97	100	326,992,570	16.39	9.13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
0.	0.	00.	01.	012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	182 OB	3,330,798,184	0	26	628,080,000	12	565,418,000	46.15	90.02	12	565,418,000	6.59	16.98	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja												317.67	87.18			13.95	9.75			
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja												81.32	99.78			271.75	20.87			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA																				
0.	0.	00.	02.	014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	71 Unit	1,092,266,029	0	13	225,000,000	10	224,035,492	76.92	99.57	10	224,035,492	14.08	20.51	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
0.	0.	00.	02.	016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	34 Unit	470,970,000	0	210	100,000,000	180	99,991,308	85.71	99.99	180	99,991,308	529.41	21.23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja												81.32	99.78			271.75	20.87			
PROGRAM PENINGKATAN																				
1.	2.	12.	15.	001.	Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah aplikasi	15 Aplikasi	824,996,000	0	2	73,920,000	2	56,420,000	100.00	76.33	2	56,420,000	13.33	6.84	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
1.	2.	12.	15.	011.	Pengendalian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Riau	Jumlah perusahaan PMDN yang dikendalikan	190 PMDN	1,690,000,000	0	26	29,570,000	9	21,785,000	34.62	73.67	9	21,785,000	4.74	1.29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
1.	2.	12.	15.	017.	Pengembangan Promosi	-jumlah /jenis proyek investasi ready to offer yang ditawarkan -jumlah market	10 Proposal	1,556,656,000	0	2	89,527,500	1	23,812,422	50.00	26.60	1	23,812,422	10.00	1.53	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
1.	2.	12.	15.	019.	Penyusunan Buku Statistik Investasi Daerah	Jumlah buku statistik investasi daerah	1175 buku	630,000,000	0	225	24,900,000	225	24,797,800	100.00	99.59	225	24,797,800	19.15	3.94	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Rata-rata Capaian Kinerja											71.15	69.05		11.80	3.40					
Predikat Kinerja											Sedang	Sedang		Sangat	Sangat					
1.	2.	12.	16.	PROGRAM PENYELENGGARAAN																
1.	2.	12.	16.	003. Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi Tentang Pelayanan Perizinan dan Non	Jumlah aplikasi/sistem informasi manajemen pelayanan dan perizinan dan	3 Sistem informasi	388,256,000		0	3	208,488,000	1	164,013,600	33.33	78.67	1	164,013,600	33.33	42.24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
1.	2.	12.	16.	004. Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan	Jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat dan sertifikasi Sertifikasi ISO 9001-	10 Laporan	890,239,000		0	2	25,864,000	2	25,864,000	100.00	100.00	2	25,864,000	20.00	2.91	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
1.	2.	12.	16.	005. Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah media informasi tentang perizinan dan nonperizinan melalui media	10 Jenis media informasi	878,660,000		0	2	93,288,000	3	91,250,000	150.00	97.82	3	91,250,000	30.00	10.39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
1.	2.	12.	16.	008. Peningkatan Kinerja Tim Survey Perizinan dan NonPerizinan	Jumlah BAP	1150 BAP	2,769,920,000		0	220	424,862,200	200	440,345,200	90.91	103.64	200	440,345,200	17.39	15.90	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Rata-rata Capaian Kinerja											93.56	95.03		25.18	17.86					
Predikat Kinerja											Sangat	Sangat		Sangat	Sangat					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI KESELURUHAN PROGRAM											140.93	87.76		80.67	12.97					
PREDIKAT KINERJA DARI KESELURUHAN PROGRAM												Tinggi		Tinggi	Sangat					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :-																				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :-																				
Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya :-																				
Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Renja PD Berikutnya :-																				

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana apratur			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Prosentase meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur pada Dinas PMPTSP Provinsi Riau			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN			22.89 T	40.8 T	24.8 T	25.2 T	41.80	22.75 T	24.8 T	25.2 T	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat			82	91	92	93	99.32	99.90	99.92	99.95	

Tabel T-C.31
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP
 TAHUN 2020

Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						22,426,695,940	20,971,848,920			
	Belanja Pegawai						19,643,200,120	18,397,875,522			
	Belanja Gaji dan Tunjangan						19,643,200,120	18,397,875,522			
0.	0.	00.	01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1,488,076,120	1,401,658,576			
0.	0.	00.	01.	001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	KOTA PEKANBARU	200 Surat	10,998,000	200 Surat	7,135,000
0.	0.	00.	01.	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	KOTA PEKANBARU	12 Rekening	47,886,000	12 Rekening	32,369,006
0.	0.	00.	01.	003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	KOTA PEKANBARU	3 Unit	13,500,000	58 Unit	10,200,000
0.	0.	00.	01.	007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	KOTA PEKANBARU	45 Jenis	190,930,000	57 Jenis	190,550,000
0.	0.	00.	01.	008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	KOTA PEKANBARU	37 Jenis	193,840,000	43 Jenis	193,300,000
0.	0.	00.	01.	010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	KOTA PEKANBARU	6843 Porsi	75,744,000	1500 Porsi	75,694,000
0.	0.	00.	01.	011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	KOTA PEKANBARU	103 Orang	327,098,120	100 Orang	326,992,570
0.	0.	00.	01.	012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	KOTA PEKANBARU	26 OB	628,080,000	26 OB	565,418,000
0.	0.	00.	02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					325,000,000		324,026,800
0.	0.	00.	02.	014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	KOTA PEKANBARU	13 Unit	225,000,000	10 Unit	224,035,492

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan	
					Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8				
0.	0.	00.	02.	016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KOTA PEKANBARU	210 Unit	100,000,000	180 Unit	99,991,308
1.	2.	12.	15.		PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI				217,917,500		126,815,222
1.	2.	12.	15.	001.	Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah aplikasi	KOTA PEKANBARU	2 Aplikasi	73,920,000	2 Aplikasi	56,420,000
1.	2.	12.	15.	011.	Pengendalian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Riau	Jumlah perusahaan PMDN yang dikendalikan	KOTA PEKANBARU	26 PMDN	29,570,000	9 PMDN	21,785,000
1.	2.	12.	15.	017.	Pengembangan Promosi	- jumlah /jenis proyek investasi ready to offer yang ditawarkan ,- jumlah market target,- jumlah frekwensi expose,-direct sale'- seminar yang dilaksanakan dan diikuti,-jumlah dokumen promosi penanaman	KOTA PEKANBARU	2 Projek	89,527,500	1 Projek	23,812,422
1.	2.	12.	15.	019.	Penyusunan Buku Statistik Investasi Daerah	Jumlah buku statistik investasi daerah	KOTA PEKANBARU	225 Buku	24,900,000	225 Buku	24,797,800
1.	2.	12.	16.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN				752,502,200		721,472,800
1.	2.	12.	16.	003.	Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi	Jumlah aplikasi/sistem informasi manajemen pelayanan dan perizinan dan non perizinan	KOTA PEKANBARU	3 Aplikasi	208,488,000	1 Aplikasi	164,013,600
1.	2.	12.	16.	004.	Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan	Jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat dan sertifikasi Sertifikasi ISO 9001-2015	KOTA PEKANBARU	2 Laporan	25,864,000	2 Laporan	25,864,000
1.	2.	12.	16.	005.	Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah media informasi tentang perizinan dan nonperizinan melalui media cetak dan media elektronik	KOTA PEKANBARU	2 Media	93,288,000	3 Media	91,250,000
1.	2.	12.	16.	008.	Peningkatan Kinerja Tim Survey Perizinan dan NonPerizinan	Jumlah BAP	KOTA PEKANBARU	220 BAP	424,862,200	200 BAP	440,345,200

TABEL T.C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
PROVINSI RIAU

Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju 2022	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	2	3	4	6	8	9	10	11	13	15	
0.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						#####			23,861,579,280.00	
0.00.	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH						#####			23,861,579,280.00	
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						#####			23,861,579,280.00	
0.00.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						#####			18,093,081,817.00	
0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			KOTA PEKANBARU;	115 Orang			(Pendapatan Asli Daerah) PAD	132 Orang	18,093,081,817.00	
0.00.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0.00			87,600,000.00	
0.00.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Stel Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi pegawai DMPTSP Provinsi Riau;	KOTA PEKANBARU;	-			(Pendapatan Asli Daerah) PAD	146 Stel	87,600,000.00	
0.00.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,679,681,868.00			1,265,304,566.00	
0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan dan Jumlah Peralatan ; Perlengkapan Kantor yang disediakan;	KOTA PEKANBARU;	45 Jenis ; 195 Unit;		966,906,683.00			350,005,759.00	
0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			KOTA PEKANBARU;	7112 Posri		147,292,368.00	(Pendapatan Asli Daerah) PAD	43 Jenis 193 Unit	200,000,000.00	
0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Jenis Laporan yang dicetak dan digandakan;	KOTA PEKANBARU;	40 jenis;		189,824,817.00	(Pendapatan Asli Daerah) PAD	7800 Posri	99,659,807.00	
0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			KOTA PEKANBARU;	128 Orang		375,658,000.00	(Pendapatan Asli Daerah) PAD	40 jenis	615,639,000.00	
0.00.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						707,391,056.00			1,319,311,080.00	
0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;	KOTA PEKANBARU;	200 surat;		14,990,000.00			20,000,000.00	
0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening yang dibayar;	KOTA PEKANBARU;	12 Rekening;		44,280,000.00	(Pendapatan Asli Daerah) PAD	200 surat	44,279,800.00	
0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran;	KOTA PEKANBARU;	28 OB;		648,121,056.00	(Pendapatan Asli Daerah) PAD	12 Rekening	1,255,031,280.00	
0.00.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412,930,000.00			316,060,000.00	
0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			KOTA PEKANBARU;	-		0.00	(Pendapatan Asli Daerah) PAD	1 Unit	44,030,000.00	
0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			KOTA PEKANBARU;	12 Unit		331,010,000.00	(Pendapatan Asli Daerah) PAD	12 Unit	222,030,000.00	
0.00.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			KOTA PEKANBARU;	5 Unit		81,920,000.00	(Pendapatan Asli Daerah) PAD	5 Unit	50,000,000.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,664,784,013.00			2,780,221,817.00	
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3,664,784,013.00			2,780,221,817.00	
2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						893,170,000.00			143,205,000.00	
2.18.02.1.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi						893,170,000.00			143,205,000.00	
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi			KOTA PEKANBARU;	1 Buku		893,170,000.00	(Pendapatan Asli Daerah) PAD	1 Dokumen	143,205,000.00	
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						491,727,365.00			831,705,788.00	
2.18.03.1.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						491,727,365.00			831,705,788.00	
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		6 Dokumen;	KOTA PEKANBARU;	2 Event		268,517,005.00	(Pendapatan Asli Daerah) PAD	3 Lokasi	381,737,390.00	
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		2 Even;	KOTA PEKANBARU;	2 Laporan		223,210,360.00	(Pendapatan Asli Daerah) PAD	3 Laporan/ Dokumen	449,968,398.00	
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						1,306,553,080.00			761,925,029.00	
2.18.04.1.02.	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						1,306,553,080.00			761,925,029.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			ROTA PEKANBARU;	3 Aplikasi		222,943,248.00	(Pendapatan Asli Daerah) PAD	3 Aplikasi	17,496,000.00
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			ROTA PEKANBARU;	250 BAP/ 12 Kab/Kota		889,475,215.00	(Pendapatan Asli Daerah) PAD	220 BAP 12 Kab /Kota	549,029,080.00
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Jumlah peserta; Teriaksananya Penanaman Modal Lintas Daerah Kab/Kota;	ROTA PEKANBARU;	100 orang; 12 Kabupaten Kota;		194,134,617.00	(Pendapatan Asli Daerah) PAD	100 Orang, 12 Kab /Kota	195,399,949.00
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						778,419,568.00			909,494,000.00
2.18.05.1.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						778,419,568.00			909,494,000.00
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			ROTA PEKANBARU;	34 PMDN		79,650,000.00	DAK NON FISIK	34 PMDN	79,650,000.00
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			ROTA PEKANBARU;	300 Orang		377,919,568.00	DAK NON FISIK	324 Orang	643,994,000.00
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		jumlah perusahaan PMDN yang dikendalikan ;	ROTA PEKANBARU;	60 PMDN		320,850,000.00	DAK NON FISIK	33 PMDN	185,850,000.00
2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						194,914,000.00			133,892,000.00
2.18.06.1.01.	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi						194,914,000.00			133,892,000.00
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		jumlah aplikasi;	ROTA PEKANBARU;	3 aplikasi;		194,914,000.00	(Pendapatan Asli Daerah) PAD	3 Buku	133,892,000.00
Total Pagu							#####			23,861,579,280.00

